

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Saat ini persaingan dalam dunia bisnis semakin pesat. Hal ini mengharuskan Perusahaan untuk mendapatkan informasi yang relevan, tepat waktu, lengkap dan benar, agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan terkait dengan permasalahan yang ada pada Perusahaan. Dengan adanya tuntutan seperti itu, pada akhirnya Perusahaan juga dituntut untuk membuat sistem untuk mengatur alur informasi yang dibutuhkan.

Tujuan utama dari suatu Perusahaan manufaktur dan dagang adalah mendapatkan pendapatan yang maksimal atas penjualan produk yang mereka lakukan. Guna mendukung tujuan tersebut, Perusahaan perlu melakukan sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatannya yang dihasilkan dari penjualan tersebut. Sistem informasi akuntansi penjualan adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan.

Secara umum Perusahaan harus memiliki sistem yang tepat dalam semua aspek yang dijalankannya. Sistem yang baik merupakan salah satu dalam pengendalian. Kegunaan efisiensi Perusahaan dapat dikatakan efektif bergantung terhadap kebijakan manajemen yang dibuat. Pihak manajemen mengutamakan adanya pengendalian internal, maka bagian yang ada dalam struktur organisasi pun harus mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan agar tujuan pengendalian dapat terpenuhi maka perlu adanya pengendalian sistem penjualan.

Pengendalian internal merupakan hal yang mendasar dalam sistem akuntansi. Pengendalian internal (internal control) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva Perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Pengendalian Pihak manajemen mengutamakan adanya pengendalian internal, maka bagian yang ada dalam struktur organisasi pun harus mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan agar tujuan pengendalian dapat terpenuhi maka perlu adanya pengendalian sistem penjualan.

Pengendalian internal merupakan hal yang mendasar dalam sistem akuntansi. Pengendalian internal (internal control) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi

aktiva Perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Pengendalian internal yang baik diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi, yang berguna bagi Perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih reliabel, mencegah kecurangan-kecurangan, dan mengamankan kekayaan perusahaan.

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dalam siklus penjualan, ada dua transaksi kunci yaitu penjualan kredit yang akan menghasilkan piutang dagang, dan penjualan tunai. Dari dua transaksi tersebut biasanya terdapat beberapa risiko terjadinya kecurangan. Dengan adanya risiko yang mungkin timbul, Perusahaan diharapkan memiliki pengendalian internal yang baik atas siklus penjualan untuk menghindari kecurangan yang dapat menghambat tujuan suatu perusahaan.

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) merupakan salah satu BUMN Indonesia yang kegiatan operasionalnya menyalurkan beras ke setiap titik distribusi (daerah). Program Raskin (beras untuk rumah tangga miskin) merupakan program nasional yang bertujuan membantu memenuhi kecukupan pangan dan mengurangi beban finansial rumah tangga miskin (RTM) melalui penyediaan beras bersubsidi. Sejak 2014, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, (sebelumnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau disingkat Kemenko Kesra) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Untuk pendistribusian beras, Badan Urusan Logistik (BULOG) bertanggung jawab mendistribusikan beras hingga titik distribusi, dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyalurkan beras dari titik distribusi kepada RTM.

Program Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998 di bawah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Selama sembilan tahun pelaksanaan Program Raskin, berbagai pihak telah melakukan evaluasi dan hasilnya telah memberikan input bagi perbaikan konsep dan pelaksanaan program. Beberapa penyesuaian yang telah dilakukan antara lain meliputi perubahan nama, jumlah beras per rumah tangga, frekuensi distribusi, sumber dan jenis data sasaran penerima manfaat, dan penyediaan lembaga pendamping.

Pada tahun 2017, pemerintah melakukan reformasi bantuan sosial dari Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) menjadi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program Rastra merupakan program yang memberikan bantuan 10 kg beras perbulan kepada penerima manfaat. Lalu program ini diubah menjadi BPNT, dimana penerima manfaat diberikan *e-voucher* sebesar Rp. 110.000,00 perbulan untuk bisa ditukar menjadi beras dan telur di agen *e-warong* terdekat.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan adanya program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Program BPNT pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program Raskin (nama beras bantuan rakyat miskin), Program Rastra (beras sejahtera) dan Bansos. Selama tujuh tahun pelaksanaan Program Rastra berbagai pihak telah melakukan evaluasi dan hasilnya telah memberikan input bagi perbaikan konsep dan pelaksanaan program. Program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM. Selain itu juga untuk meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, serta memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 Kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00/Kg (Netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di pegang oleh Perum BULOG.

Tujuan pemerintah dalam Program Raskin ini tidak mungkin luput dalam penyimpangan. Ada masalah dalam penyaluran program Raskin. Mengenai salah sasaran. Program Raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada masyarakat miskin ternyata jatuh pada kelompok keluarga lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh human error, di mana para petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon Raskin pada keluarga dekat atau teman kerabatnya Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang "menagih jatah" beras murah tersebut. Menurut Lembaga Penelitian SMERU menyatakan bahwa Program

Raskin menjangkau 52,6% rumah tangga miskin dan 36,9% termasuk rumah tangga bukan miskin (keluarga sejahtera).

Menurut Pedum Raskin, terdapat indikator 6T untuk mengukur tingkat keberhasilan Raskin, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Secara umum, hasil kajian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Raskin relatif rendah. Indikasinya terlihat dari kurangnya sosialisasi dan transparansi, kekurangtepatan target penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerimaan beras, tingginya biaya pengelolaan program, belum optimalnya pelaksanaan monitoring, dan kurang berfungsinya mekanisme pengaduan. Uraian berikut menyajikan rincian permasalahan tersebut.

Hal yang sangat penting dalam penyaluran Raskin ini yaitu bagaimana Perum menerapkan pengendalian yang baik atas penyaluran tersebut agar resiko-resiko yang timbul dari penyaluran tersebut dapat diminimalisir atau terhindar dari kecurangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, mengetahui masalah dalam penyaluran Program Bansos maka, penulis memandang pentingnya sistem pengendalian internal pada sistem akuntansi atas siklus penjualan terutama pada penjualan Perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Serta Implementasi Terhadap Penyaluran Raskin Pada Perum BULOG Divre Sumut.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan adalah:

1. Apakah pelaksanaan program Raskin di Sumatera Utara telah mencapai tujuan?
2. Apa manfaat program Raskin bagi masyarakat di Sumatera Utara?
3. Apa hal-hal yang masih menghambat keberhasilan pelaksanaan Penyaluran Raskin di Sumatera Utara?
4. Apakah pengendalian internal atas penyaluran Raskin di Sumatra Utara sudah berjalan dengan baik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini, memiliki tujuan untuk:

1. Untuk menilai pelaksanaan program penyaluran Raskin di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui manfaat program Raskin bagi masyarakat di Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui hal-hal yang masih menghambat keberhasilan pelaksanaan penyaluran bansos di Sumatera Utara.
4. Untuk menilai pengendalian internal Perum BULOG atas penyaluran Bansos di Sumatera Utara.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

1. Bagi Perusahaan  
Memberikan gambaran pada Perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal dan Implementasi Penyaluran Raskin pada Perum BULOG agar tujuan Perusahaan (Perum BULOG) dapat tercapai dengan baik.
2. Bagi pihak lain  
Dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, informasi dan wawasan teoritis dalam penelitian selanjutnya guna melakukan analisa yang lebih baik, khususnya pada topik dan permasalahan ini.
3. Manfaat bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan tambahan informasi sebagai acuan untuk membuat penelitian selanjutnya dan juga dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dalam mempelajari akutansi yang diterapkan mengenai Pengendalian Internal dan Implementasi Penyaluran Raskin.